

Membangun Warga Negara Ideal: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Indonesia

¹Harnum Khanaya Tabitha Silitonga, ²Dinda Arini, ³Suratya Marsoit, ⁴Maria Christina Br Naibaho, ⁵Sri Yunita

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan, Indonesia

Indonesian Journal of Learning
Studies (IJLS)

Vol. 5, No. 2, 2025

E-ISSN 2775-5231

Corresponding Author:

Harnum Khanaya Tabitha Silitonga

harnumsilitonga2006@gmail.com

Published by:

Perkumpulan Dosen Muslim
Indonesia



Copyright © 2025

The Author(s)

This article is licensed under CC BY-
NC-SA 4.0 License



Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia berperan krusial dalam membentuk warga negara ideal yang memiliki kesadaran hukum, partisipasi politik bertanggung jawab, toleransi, dan kontribusi aktif bagi bangsa. Kajian ini menelaah peran PKn, menganalisis kurikulum, metodologi, dan kualitas pendidik, serta menelusuri sejarah perkembangannya. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, mengevaluasi efektivitas PKn dalam menanamkan nilai-nilai dan kompetensi di era modern, mengantisipasi tantangan kontemporer seperti teknologi dan polarisasi sosial. Kesimpulannya, peningkatan kualitas dan efektivitas PKn memerlukan strategi inovatif, kolaborasi multi-sektoral, dan pendekatan pedagogis yang efektif untuk menginternalisasi nilai-nilai dan mengembangkan kompetensi warga negara yang ideal.

Kata kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Warga Negara Ideal, Indonesia, kurikulum PKn

Pendahuluan

Pembangunan warga negara ideal di Indonesia, sebuah negara dengan keragaman budaya dan sosial yang kompleks, merupakan proses dinamis dan terus berkembang. Konsep "warga negara ideal" bukanlah entitas statis, melainkan konstruksi sosial yang berevolusi seiring perubahan konteks politik, ekonomi, dan sosial budaya. Oleh karena itu, kajian komprehensif mengenai peran pendidikan kewarganegaraan dalam membentuk warga negara ideal di Indonesia sangat krusial. Kajian ini akan menelaah secara mendalam berbagai aspek terkait, melampaui analisis superfisial dan menuju pemahaman bernuansa dan berbasis bukti empiris. Kajian ini akan mendefinisikan secara teliti konsep "warga negara ideal" dalam konteks Indonesia, mempertimbangkan nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila dan UUD 1945, serta aspek multidimensi kewarganegaraan: kesadaran hukum, partisipasi politik bertanggung jawab, toleransi antarumat beragama dan budaya, dan kontribusi aktif bagi kemajuan bangsa.

Analisis ini akan memperhatikan perkembangan terkini dalam diskusi akademis mengenai kewarganegaraan dan kebutuhan bangsa Indonesia di era globalisasi dan digitalisasi. Selanjutnya, kajian ini akan menganalisis secara kritis sistem pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, mengevaluasi kurikulum, metodologi pengajaran, dan kualitas pendidik. Kajian ini akan menyelidiki efektivitas kurikulum kewarganegaraan dalam menanamkan nilai-nilai dan mengembangkan kompetensi yang dibutuhkan warga negara di era modern, serta memperhatikan aksesibilitas pendidikan kewarganegaraan bagi seluruh lapisan masyarakat mengingat keragaman geografis dan sosial ekonomi yang ada. Lebih lanjut, kajian ini akan menelusuri sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia untuk memahami evolusi konsep dan implementasinya, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan masa lalu, dan merumuskan strategi yang lebih efektif di masa depan. Akhirnya, kajian ini akan menawarkan rekomendasi berbasis bukti untuk peningkatan kualitas dan efektivitas pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, mempertimbangkan tantangan kontemporer seperti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, polarisasi sosial, dan perubahan dinamika global. Tujuan akhir kajian ini adalah memberikan kontribusi bermakna bagi upaya pembangunan warga negara ideal di Indonesia dengan landasan yang kuat dan berkelanjutan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian tentang Membangun Warga Negara Ideal: Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Indonesia adalah dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan dan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal, catatan, dan laporan yang relevan dengan topik penelitian. Dalam artikel ini, penulis menggunakan metode ini dengan menelaah berbagai literatur untuk mendapatkan informasi yang mendukung pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Warga Negara Ideal

warga negara yang ideal adalah mereka yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi serta mampu menjalankan kehidupan bernegara dengan kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Mereka tidak hanya mengetahui dan memahami hukum, tetapi juga memiliki sikap positif terhadap hukum dan menjadikannya pedoman dalam bertindak. Dalam konteks ini, warga negara yang ideal turut berperan dalam menciptakan negara yang adil dan berkeadaban melalui partisipasi aktif, kepatuhan hukum yang tulus, serta semangat kebangsaan yang kuat. Dengan demikian, keberadaan warga negara yang ideal menjadi fondasi utama dalam membangun negara yang damai, tertib, dan bermartabat.

Untuk menjadi warga negara yang baik, seseorang harus memiliki kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sifat yang sesuai dengan kewarganegaraan. Pengetahuan kewarganegaraan, juga dikenal sebagai pengetahuan kewarganegaraan, mencakup pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara, struktur politik, hukum, dan nilai-nilai konstitusional yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Orang tidak dapat berpartisipasi secara efektif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa pengetahuan yang baik.

Selain memiliki pengetahuan, warga negara yang ideal harus memiliki keterampilan kewarganegaraan. Kemampuan berpikir kritis, berargumentasi secara rasional, berpartisipasi dalam aktivitas sosial dan politik, dan membuat keputusan yang bijaksana untuk kepentingan umum termasuk dalam keterampilan ini. Keahlian ini memungkinkan warga negara untuk memahami masalah dan berpartisipasi dalam penyelesaiannya secara demokratis.

Yang paling penting, sifat atau karakter kewarganegaraan—juga dikenal sebagai disposisi kewarganegaraan—menjadi dasar utama dalam pembentukan warga negara ideal. Sikap bertanggung jawab, disiplin diri, dihargai terhadap martabat manusia, kepedulian sosial, kesopanan, dan dihargai terhadap hukum dan aturan yang berlaku adalah ciri-ciri karakter ini. Selain itu, warga negara yang ideal memiliki keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain, bersedia untuk bernegosiasi, dan bersedia untuk berkompromi demi kepentingan bersama. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional.

Pendidikan formal yang bersifat indoktrinatif bukan satu-satunya cara untuk membangun warga negara yang baik. Pendidikan kewarganegaraan harus kritis dan dialogis. Hal ini harus memungkinkan siswa untuk memahami dan memancarkan berbagai perspektif serta membuat komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Metode ini memungkinkan warga negara tidak hanya tunduk pada kekuasaan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang bertanggung jawab untuk membangun masyarakat yang adil dan demokratis.

Jadi, warga negara yang baik adalah mereka yang dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan sosial-politik, mempertahankan prinsip-prinsip Pancasila dan UUD 1945, dan terus mengembangkan komitmen mereka terhadap demokrasi dan kemanusiaan. Mereka tidak hanya memiliki pengetahuan dan kemampuan, tetapi mereka juga ingin dan bertindak demi kebaikan bersama. Pendidikan karakter kewarganegaraan secara menyeluruh di sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk mencetak sosok warga negara seperti ini.

Fungsi dan Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan identitas warga negara Indonesia. Fungsi utama PKn adalah sebagai sarana untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar mengenai hubungan antara warga negara dan negara, serta untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Fungsi PKn juga mencakup pembentukan karakter yang baik, pengembangan sikap nasionalisme, serta penanaman nilai-nilai demokrasi dan toleransi. Melalui PKn, siswa diajarkan untuk memahami dan menghargai keberagaman, serta untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Tujuan utama PKn adalah untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*), yaitu individu yang memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara santun, jujur, dan demokratis. PKn juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman dan kesadaran peserta didik akan peran mereka dalam masyarakat, serta untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir kritis dan bertanggung jawab dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan politik.

Dengan demikian, PKn berfungsi sebagai wahana untuk membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkepribadian yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia, serta mampu berperan aktif dalam pembangunan nasional.

Sejarah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

Penggunaan istilah "Pendidikan Kewarganegaraan" di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu, menyesuaikan dengan dinamika sosial dan politik yang semakin kompleks. Sejak tahun 1947, meskipun tujuan utama pendidikan untuk membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius sudah ditegaskan, namun belum ada mata pelajaran khusus yang secara langsung disebut sebagai Pendidikan Kewarganegaraan. Nilai-nilai kewarganegaraan saat itu diajarkan melalui mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti dari kelas I hingga VI, dan Pendidikan Agama mulai dari kelas IV hingga VI.

Tahun 1957, pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai memperkenalkan istilah "Kewarganegaraan" dalam kurikulum, yang mencakup pembelajaran tentang bagaimana seseorang bisa memperoleh atau kehilangan status kewarganegaraan serta memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Di tingkat SMP dan SMA, pelajaran ini dikenal sebagai Tata Negara dan Tata Hukum. Perubahan kembali terjadi pada 1959 saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Istilah pelajaran Kewarganegaraan diganti menjadi "Civics", yang mencakup materi seperti sejarah kebangkitan nasional, Undang-Undang Dasar 1945, serta pidato-pidato kenegaraan. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk karakter bangsa. Buku yang digunakan saat itu antara lain "Civics: Manusia dan Masyarakat Indonesia Baru" dan "Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi" (TUBAPI), yang ditulis oleh Soekarno dan koleganya, berisi tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Namun, karena pelajaran Civics lebih banyak berisi doktrin dan fokus pada aspek pengetahuan, maka pada tahun 1962, Menteri Kehakiman Suhardjo mengusulkan penggantian istilah Civics menjadi "Kewargaan Negara". Usulan ini disetujui oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prijono, meskipun tidak secara resmi ditetapkan. Akibatnya, dalam kurikulum sekolah dasar hingga menengah, istilah Civics dan Kewargaan Negara digunakan bergantian. Civics lebih menekankan pada sejarah perjuangan bangsa, sedangkan Kewargaan Negara lebih fokus pada kesadaran bernegara dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tahun 1966, ketika pemerintahan Soeharto menggantikan Soekarno, banyak kebijakan berubah termasuk dalam bidang pendidikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 31 Tahun 1967, materi pelajaran Civics diperluas mencakup Pancasila, UUD 1945, ketetapan MPRS, dan pengenalan PBB. Kurikulum 1968 pun lahir dengan mengganti nama Civics menjadi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN). Di tingkat SD, materi PKN meliputi pengetahuan kewarganegaraan, sejarah, dan geografi. Untuk SMP, cakupannya lebih luas hingga pada nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan sejarah perjuangan bangsa, sementara di SMA lebih mendalam pada pasal-pasal UUD 1945 dan ilmu sosial lainnya.

Di perguruan tinggi, dua mata kuliah wajib yaitu Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewiraan diperkenalkan. Tujuan dari Kewiraan adalah menanamkan pemahaman mengenai bela negara sebagai bagian dari ketahanan nasional. Pada 1973, kurikulum kembali berubah menjadi Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP). Pelajaran kewarganegaraan menggunakan berbagai istilah seperti Pendidikan Kewargaan Negara, Studi Sosial, Civics, dan Hukum. Di jenjang SD, istilah yang digunakan

adalah Pendidikan Kewargaan Negara dalam bentuk mata pelajaran IPS terpadu. Sementara itu, di SMP digunakan istilah Studi Sosial dan di SMA istilah Civics dan Hukum dipakai untuk jurusan IPS.

Tahun 1974, Departemen Pendidikan melalui BP3 menetapkan delapan tujuan kurikuler dalam bidang Pendidikan Kewargaan Negara. Namun, pada tahun 1975, PPSP digantikan oleh kurikulum baru di mana istilah Pendidikan Kewargaan Negara berubah menjadi Pendidikan Moral Pancasila (PMP). PMP menjadi pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan formal, dari SD hingga sekolah kejuruan. Pada tahun 1978, MPR menetapkan P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, yang menjadi landasan utama dalam pelajaran PMP. Tujuannya adalah memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kurikulum 1975 dikritik karena masih terlalu fokus pada aspek kognitif.

Menanggapi kritik tersebut, pemerintah merilis Kurikulum 1984 melalui Keputusan No. 0461/U/1984 dan No. 0209/U/1984 untuk menyempurnakan sistem pendidikan agar mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Meski demikian, pelajaran PMP masih dianggap belum sepenuhnya berhasil karena tetap dominan pada hafalan. Pada tahun 1994, kurikulum berubah lagi melalui SK Mendikbud No. 060/U/1993, dan nama mata pelajaran juga berubah menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Meski nama berubah, substansi pelajaran tidak banyak mengalami perbedaan. Banyak akademisi menilai perubahan ini hanya kosmetik dan tidak berdampak besar terhadap kualitas pendidikan, bahkan dianggap memboroskan anggaran.

Tahun 1998, ketika Indonesia memasuki era reformasi, terjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan. Salah satu dampaknya adalah dihapusnya materi P4 dari kurikulum PPKn. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran arah pembelajaran kewarganegaraan ke arah yang lebih kritis dan terbuka.

Pada tahun 2002, di tingkat perguruan tinggi, Pendidikan Kewiraan diganti menjadi Pendidikan Kewarganegaraan. Namun beberapa institusi seperti UIN, IAIN, dan STAN memilih menggunakan istilah "Pendidikan Kewargaan". Lalu pada 2003, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi mata pelajaran dan mata kuliah wajib di semua jenjang pendidikan. Perubahan kurikulum kembali terjadi pada tahun 2004 dengan diperkenalkannya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang bertujuan mengurangi pembelajaran berbasis hafalan. Meski demikian, istilah Pendidikan Kewarganegaraan tetap dipakai. Tahun 2006, kurikulum KBK disempurnakan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan istilah tersebut masih dipertahankan.

Tahun 2013, Indonesia kembali menerapkan kurikulum baru yaitu Kurikulum 2013, namun istilah Pendidikan Kewarganegaraan masih tetap digunakan. Lalu pada tahun 2014, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dipecah menjadi dua kementerian. Pada masa itu, pemerintah mengizinkan penggunaan dua kurikulum sekaligus: KTSP dan Kurikulum 2013, tergantung kesiapan masing-masing sekolah. Walaupun terdapat dualisme kurikulum, Pendidikan Kewarganegaraan tetap menjadi mata pelajaran dan mata kuliah yang wajib diajarkan.

Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membentuk Warga Negara Ideal

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pilar penting, meskipun bukan satu-satunya, dalam membentuk individu menjadi warga negara ideal, baik di ranah domestik maupun

internasional. Suksesnya proses ini bergantung pada berbagai faktor yang saling terkait, termasuk pendekatan pedagogis yang efektif, kolaborasi antar berbagai sektor masyarakat (pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat sipil), serta kemampuan untuk mengatasi tantangan struktural dan kontekstual. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai peran dan kompleksitas pendidikan kewarganegaraan:

1. Menginternalisasi Nilai-nilai dan Prinsip-prinsip Dasar:

Tujuan utama pendidikan kewarganegaraan bukan hanya sekadar transfer pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai-nilai dan prinsip-prinsip fundamental yang membentuk karakter moral dan perilaku warga negara yang ideal. Hal ini mencakup:

- 1) Nilai-nilai Etika dan Moral Universal: Pendidikan harus menanamkan nilai-nilai seperti tanggung jawab, rasa hormat, kejujuran, keadilan, kerjasama, empati, dan integritas. Nilai-nilai ini merupakan fondasi bagi interaksi sosial yang konstruktif dan harmonis. Namun, penting untuk menghindari pendekatan indoktrinatif yang hanya menghasilkan kepatuhan permukaan dan hipokrisi, seperti yang terjadi pada program Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) di era Orde Baru. Sebaliknya, pendekatan yang menekankan pemahaman kritis, refleksi diri, dan diskusi terbuka jauh lebih efektif dalam membentuk karakter yang autentik.
- 2) Prinsip-prinsip Kewarganegaraan yang Komprehensif: Kurikulum kewarganegaraan harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban warga negara, partisipasi aktif dalam sistem demokrasi, mekanisme pemerintahan dan hukum, serta pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap keberagaman (pluralisme). Dalam konteks global, ini meliputi pemahaman hak asasi manusia universal, kerja sama internasional, dan tanggung jawab terhadap isu-isu global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan perdamaian dunia. Pembelajaran harus mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.
- 3) Nasionalisme yang Berwawasan Global: Pendidikan kewarganegaraan harus menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebanggaan nasional, tetapi bukan nasionalisme yang sempit dan eksklusif. Sebaliknya, ia perlu mendorong pemahaman dan apresiasi terhadap keberagaman budaya global, serta kemampuan untuk berkolaborasi dengan warga negara dari berbagai latar belakang dalam menghadapi tantangan global. Ini berarti membangun identitas nasional yang kuat, tetapi juga kesadaran akan kewarganegaraan global dan tanggung jawab terhadap masyarakat internasional.

2. Pengembangan Keterampilan dan Kompetensi yang Relevan:

Selain penanaman nilai dan prinsip, pendidikan kewarganegaraan juga harus membekali individu dengan keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif dan efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara:

- 1) Berpikir Kritis dan Analitis: Kemampuan untuk menganalisis informasi secara objektif, mengevaluasi berbagai perspektif, mengidentifikasi bias, dan membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab sangatlah penting dalam menghadapi kompleksitas isu-isu kontemporer. Proses pembelajaran harus mendorong penyelidikan, perdebatan yang konstruktif, dan pengembangan argumen yang didukung bukti.
- 2) Partisipasi Aktif dan Kolaboratif: Pendidikan harus melatih warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam berbagai forum dan tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Ini mencakup kemampuan untuk terlibat dalam

diskusi publik, bernegosiasi, berkompromi, dan berkolaborasi dengan orang lain dari berbagai latar belakang untuk mencapai tujuan bersama. Metode pembelajaran aktif seperti simulasi, permainan peran, dan proyek berbasis masyarakat dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan ini.

- 3) Komunikasi yang Efektif dan Respektif: Kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan, sangat penting dalam partisipasi politik dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan harus melatih warga negara untuk menyampaikan ide dan gagasan mereka dengan jelas, persuasif, dan respektif, serta mendengarkan dan memahami perspektif orang lain.
- 4) Pemahaman Isu-isu Kontemporer: Individu perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang isu-isu kontemporer yang kompleks, seperti radikalisme, intoleransi, perkembangan teknologi, perubahan iklim, ketimpangan ekonomi, dan perkembangan geopolitik. Hal ini memungkinkan mereka untuk mengambil peran aktif dalam mengatasi masalah-masalah tersebut.

3. Strategi Pembelajaran yang Inovatif dan Holistik:

Suksesnya pendidikan kewarganegaraan juga bergantung pada strategi pembelajaran yang inovatif dan holistik:

- 1) Pendekatan Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem-Based Learning): Metode ini memfokuskan pembelajaran pada pemecahan masalah nyata yang relevan dengan kehidupan warga negara, sehingga pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh lebih bermakna dan aplikatif.
- 2) Pembelajaran Kolaboratif dan Partisipatif: Mendorong interaksi dan kerja sama antar peserta didik, sehingga mereka belajar untuk berkomunikasi, bernegosiasi, dan berkompromi dalam mencapai tujuan bersama. Pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis komunitas dapat sangat efektif.
- 3) Penggunaan Sumber Belajar yang Beragam dan Relevan: Penggunaan studi kasus, simulasi, permainan peran, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber-sumber dari berbagai media dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan interaktif.
- 4) Integrasi dengan Mata Pelajaran Lain: Integrasi nilai-nilai dan prinsip kewarganegaraan dengan mata pelajaran lain akan memperkuat pemahaman dan aplikasinya dalam konteks yang lebih luas.

4. Mengatasi Tantangan Struktural dan Kontekstual:

Terdapat berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberhasilan pendidikan kewarganegaraan:

- 1) Intervensi Politik yang Tidak Semestinya: Intervensi politik yang tidak semestinya dapat mempengaruhi kurikulum dan kebijakan pendidikan, mengakibatkan perubahan yang seringkali tidak konsisten dan kurang efektif. Otonomi dan profesionalisme pendidik sangat penting untuk menjaga obyektivitas.
- 2) Kesenjangan antara Teori dan Praktik: Adanya kesenjangan antara materi yang diajarkan di sekolah dan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menyebabkan hipokrisi dan ketidakpercayaan terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Pembelajaran yang menghubungkan teori dengan praktik nyata melalui partisipasi dalam kegiatan masyarakat dan pemecahan masalah riil akan membantu mengatasi hal ini.

- 3) Perlunya Kerjasama Multi-Sektoral: Pembentukan warga negara ideal merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya sektor pendidikan. Kerjasama yang erat antara lembaga pendidikan, keluarga, masyarakat, dan pemerintah sangat penting untuk memastikan nilai-nilai dan keterampilan kewarganegaraan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Simpulan

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Indonesia telah menjalani perjalanan panjang, bertransformasi seiring pergeseran dinamika sosial, politik, dan ekonomi. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitasnya, tantangan signifikan masih menghalangi pencapaian tujuan utama PKn: membentuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan berdemokrasi. Beberapa kendala utama yang perlu ditangani secara serius meliputi inefisiensi metode pembelajaran yang seringkali masih berorientasi pada hafalan dan indoktrinasi, bukannya pada pemahaman konseptual dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Akibatnya, banyak siswa hanya memiliki pemahaman permukaan tanpa kemampuan analisis yang dibutuhkan untuk menghadapi kompleksitas isu-isu kontemporer. Terdapat pula kesenjangan yang cukup lebar antara teori yang diajarkan di kelas dengan realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, mengakibatkan kurangnya relevansi dan dampak pembelajaran yang signifikan. Konsep-konsep demokrasi, hak asasi manusia, dan partisipasi warga seringkali tidak tercermin dalam praktik sehari-hari, menciptakan sebuah jurang pemisah antara pengetahuan teoritis dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Intervensi politik yang tidak semestinya juga kerap menghambat perkembangan PKn yang objektif dan berorientasi pada nilai-nilai universal. Kurikulum dan metode pengajaran terkadang dipengaruhi oleh kepentingan politik jangka pendek, mengakibatkan inkonsistensi dan hilangnya fokus pada tujuan utama pembentukan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Terakhir, kurangnya kolaborasi multi-sektoral antara lembaga pendidikan, keluarga, pemerintah, dan masyarakat sipil juga menghambat internalisasi nilai-nilai dan keterampilan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mencapai tujuan pembentukan warga negara ideal, transformasi mendasar dalam PKn sangat diperlukan. Transformasi ini harus meliputi perubahan paradigma dari pendekatan pasif dan indoktrinatif menuju pendekatan aktif, kritis, dan holistik. Kurikulum PKn perlu menekankan internalisasi nilai-nilai etika universal seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pendekatan yang menekankan pemahaman kritis, refleksi diri, dan diskusi terbuka jauh lebih efektif daripada pendekatan indoktrinatif yang hanya menghasilkan kepatuhan permukaan. Selain itu, PKn harus membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, dan keterampilan berkomunikasi yang efektif agar mereka mampu berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi. Pendekatan pembelajaran yang inovatif, seperti studi kasus, simulasi, dan proyek berbasis masyarakat, juga perlu diimplementasikan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkuat pemahaman mereka tentang konsep-konsep kewarganegaraan. Terakhir, pembelajaran PKn harus mendorong dialog dan pertukaran gagasan yang kritis, menghormati perbedaan pendapat, dan memperluas wawasan global. Siswa perlu memahami konteks global, tantangan internasional, dan peran mereka sebagai warga negara global yang bertanggung jawab. Dengan demikian, transformasi PKn yang komprehensif ini akan menghasilkan warga negara Indonesia yang

lebih bertanggung jawab, aktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan demokratis.

Referensi

- Arif, D. B. (2014). Pendidikan kewarganegaraan dan pembentukan karakter demokratis warga negara. Prosiding Seminar Nasional Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Membangun Karakter Anak untuk Menyongsong Generasi Emas Indonesia. Jogja Expo Center (JEC).
- Dodi Irawan, A. D. (2022). Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Membentuk Kepribadian. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 97-110.
- Ina Magdalena, Ahmad Syaiful Haq, Fadlatul Ramdhan. (2021). Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. *Bintang: Jurnal Pendidikan dan Sains*, 5(2), 420-428
- Manurung, C. N. (2022, Maret 16). Menjadi warga negara yang baik. BINUS University.
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 14(2), 218–225.
- Samsuri. (2012). Pendidikan karakter warga negara: Kritik pembangunan karakter bangsa (Edisi Revisi). Pustaka Hanif.
- Sutrisno. (2018). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Membangun Warga Negara Global. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 41-51.
- Widiatmaka, P. (2022). Perkembangan pendidikan kewarganegaraan (PKn) di dalam membangun karakter bangsa peserta didik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 1–10.